

PENYULUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI SMP TUNAS HARAPAN NUSANTARA BEKASI

Binastya Anggara Sekti¹, Nin Yasmine Lisasih², Nixon Erzed³, Endik Wahyudi⁴,
Adhining Prabawati Rahmahani⁵, Ahluddin Saiful Ahmad⁶, Idris Wasahua⁷,
Nyoman Putra Antara⁸, Freddy Harris⁹, Rita Alfiana¹⁰, Annisa Fitria¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11} Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

anggara@esaunggul.ac.id

Abstract

Counseling on children's rights and obligations is an educational effort that aims to increase children's awareness of their rights and responsibilities that they must comply with in society. The program is important to ensure that children understand the legal protections available to them as well as the obligations that must be fulfilled to support a harmonious social order. This Community Service aims to provide counseling on the rights and obligations of children who are facing the law. Children involved in the criminal justice system often lack understanding of their rights and obligations that must be complied with. This counseling is designed to increase their knowledge and understanding of the matter, in order to ensure better legal protection for children. The methods used in this counseling include presentations, interactive discussions, and relevant case studies. The results of counseling showed a significant increase in children's understanding of their rights and obligations when dealing with the law. In addition, this study also emphasizes the importance of the active role of parents, educators, and authorities in supporting children during the legal process. It is hoped that the results of this counseling can be a reference for similar programs in the future to create a fairer and more effective justice system for children..

Keywords : *counseling, criminal justice, legal protection.*

Abstrak

Penyuluhan hak dan kewajiban anak adalah upaya edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak mengenai hak-hak mereka dan tanggung jawab yang harus mereka patuhi dalam masyarakat. Program ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka serta kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendukung tatanan sosial yang harmonis. Pengabdian masyarakat ini bermaksud untuk memberikan pendidikan mengenai hak dan tanggung jawab anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana seringkali tidak paham akan hak mereka serta kewajiban yang harus ditaati. Penyuluhan ini dirancang agar meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hal ini, untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak. Beberapa metode digunakan dalam penyuluhan ini antara lain presentasi, diskusi interaktif, dan studi kasus yang relevan. Hasil dari penyuluhan menunjukkan bahwa ada peningkatan besar pada pemahaman anak-anak tentang hak-hak dan tugas-tugas ketika mereka dipertemukan dengan hukum. Juga, penelitian ini menekankan tentang pentingnya peran orang tua, guru, dan otoritas dalam membantu anak sepanjang proses hukumnya. Diharapkan jika hasil dari pengajaran ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi acara-acara serupa di masa depan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan efisien bagi anak-anak.

Kata kunci : *penyuluhan, peradilan pidana, perlindungan hukum.*

Pendahuluan

Anak-anak merupakan aset berharga bagi masa depan suatu bangsa, oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka harus menjadi prioritas. Dalam kehidupan bermasyarakat, anak-anak tidak luput dari kemungkinan berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana (Siswanto & Miarsa, 2024). Berdasarkan UU ndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),

usia dibawah umur adalah dibawah 18 tahun (Lubis & Sinaga, 2020). Sayangnya, banyak anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana tidak memahami hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga rentan mengalami perlakuan yang tidak adil. Penyuluhan hak dan kewajiban anak menjadi upaya edukatif yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak mengenai hak-hak mereka serta tanggung jawab yang harus

mereka patuhi dalam masyarakat (Anggriawan, Bahij, Rahmah, Aurelly, & Syah, 2024).

Program penyuluhan ini dirancang untuk memberikan pendidikan yang komprehensif mengenai hak dan tanggung jawab anak yang berhadapan dengan hukum. Pengalihan konsep hukum kepada penegak hukum dan keluarga korban diperlukan untuk mencegah anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yaitu menghindari anak masuk ke dalam sistem peradilan pidana dan menghilangkan label pidana terhadap anak yang menjadi korban (Rodliyah, 2019).

Sekolah Tunas Harapan Nusantara yang berdomisili di Jalan Anggrek XIII-XV Kota Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat. Yayasan Tunas Harapan Nusantara menaungi sekolah dari jenjang TK, SD dan SMP. Visi dari sekolah ini adalah "Menjadi sekolah yang unggul dalam Iman, Karakter, Ilmu dan Teknologi", sedangkan misinya adalah "Memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan pendidikan karakter dan budaya bangsa. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam Proses Belajar Mengajar (PBM). Menghasilkan Peserta Didik berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik. Dan Menjalin kerjasama dengan warga sekolah, alumni dan masyarakat".

SMP Tunas Harapan Nusantara merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang dikelola yayasan ini dan saat ini dikomandani oleh Bapak Yupiter Roland Manafe, MA yang bertindak sebagai Kepala SMP Tunas Harapan Nusantara. SMP Tunas Harapan Nusantara memiliki keunikan yaitu sejak duduk di kelas 1, siswa-siswi di sekolah ini mulai diperkenalkan dengan empat macam bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Sunda, Inggris, dan Mandarin. Selain itu, Kepala SMP sangat mendorong agar siswa-siswanya memahami tentang hukum sejak dini, perkembangan teknologi informasi, dan lain-lain.

Melalui metode-metode seperti presentasi, diskusi interaktif, dan studi kasus yang relevan, penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman para siswa SMP tentang hak-hak dan kewajiban mereka. Hasil dari penyuluhan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak dibawah umur, serta menekankan pentingnya peran aktif orang tua, pendidik, dan pihak berwenang dalam mendukung anak-anak selama proses hukum (Nadiasih, 2021). Dengan demikian, penyuluhan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai panduan bagi program-program serupa di masa depan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif bagi anak.

Metode Pelaksanaan

Dalam menjajaki masalah hak dan kewajiban anak, tim pelaksana memberikan informasi yang lengkap bagaimana program pengabdian pada masyarakat ini. Pelaksanaan dilakukan pada:

- Tanggal : 29 Juli 2024
- Lokasi : SMP Taman Harapan Nusantara, Bekasi
- Pukul : 8:00 – Selesai
- Peserta : 117 Siswa dan 5 Guru

Adapun metoda pelaksanaannya adalah :

- Persiapan Materi dan Tim
- Pengenalan dan Sosialisasi
- Pelaksanaan Penyuluhan
- Penyampaian Materi
- Evaluasi dan Umpan Balik
- Pelaporan dan Rekomendasi
- Tindak lanjut berupa sesi penyuluhan lanjutan atau pendampingan bagi anak-anak yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Materi yang disampaikan adalah bertema "Penanganan dan Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum". Landasan hukum dari tema ini adalah undang-undang tentang perlindungan anak yaitu: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945) dan Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum (Ps. 59 UUPA) (Lubis & Sinaga, 2020).

Dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah:

- Anak pelaku kejahatan
- Anak korban tindak pidana
- Anak Saksi

Tahapam Penanganan anak dalam SPP harus melalui setiap tahapan :

- Tahap penyidikan
- Tahap penuntutan
- Tahap persidangan



Gambar 1

Konsep Penanganan Anak dalam SPPA

Hasil dari kegiatan pengabdian pada masarakat ini adalah :

- Peningkatan Pemahaman bagi Siswa. Setelah pelaksanaan penyuluhan, terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman anak-anak mengenai hak dan kewajiban mereka saat berhadapan dengan hukum. Sebelum penyuluhan, belum banyak siswa SMP yang memahami hak-hak dasar mereka. Setelah penyuluhan, terjadi peningkatan pemahaman bagi semua siswa.
- Feedback Positif dari Peserta. Sebagian besar siswa dan guru memberikan umpan balik positif mengenai penyuluhan. Mereka merasa bahwa metode yang digunakan sangat efektif dalam menyampaikan informasi.
- Keterlibatan Aktif dalam Diskusi. Anak-anak menunjukkan keterlibatan aktif selama sesi diskusi interaktif. Mereka mengajukan pertanyaan yang relevan dan memberikan tanggapan yang menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi.
- Studi Kasus yang Efektif. Studi kasus yang dibahas dalam penyuluhan membantu anak-anak memahami situasi nyata dan menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh. Para siswa dapat menganalisis kasus dan memberikan solusi yang sesuai berdasarkan hak dan kewajiban mereka.
- Peran Orang Tua dan Pendidik. Memberikan pemahaman bahwa keterlibatan orang tua dan guru memberikankan peran penting dalam mendukung anak-anak didik. Mereka merasa lebih siap dan berpengetahuan untuk membantu anak-anak memahami hak dan kewajiban mereka dalam situasi hukum.

Pembahasan dalam penyuluhan hukum pada anak dibawah umur ini adalah :

- Efektivitas Metode Penyuluhan.
- Kendala yang Dihadapi.
- Pentingnya Peran Orang Tua dan Pendidik.
- Rekomendasi untuk Penyuluhan Mendatang.
- Pengaruh Jangka Panjang

Tabel 1
Kegiatan Penyuluhan Hukum

No	Nama Kegiatan	Keterangan
1	Pemahaman Hukum Pidana	Pemateri 1
2	Pemahaman Hak-Hak Anak Terhadap Hukum	Pemateri 2
3	Tanya Jawab dan Umpan Balik	Team Universitas Esa Unggul
4	Evaluasi	Team Universitas Esa Unggul
5	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	Team Universitas Esa Unggul



Gambar 2
Pemateri Hukum Pidana



Gambar 3
Pemateri Hukum Anak



Gambar 4
Kegiatan Pengabdian



Gambar 5
Wejangan Kepala Sekolah

Melalui metode yang efektif dan keterlibatan aktif orang tua serta pendidik, penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi model untuk program-program serupa di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Anggriawan, T. P., Bahij, N., Rahmah, A., Aurelly, S. C., & Syah, A. F. (2024). Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja, Khususnya Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(07), 901–908.
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana; Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020DO - 10.46930/Jurnalrectum.V2i2.638*. Retrieved from <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/638>
- Nadiah, N. (2021). Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Mengawasi Anak Terhadap Game Online. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(3), 90–96.
- Rodliyah. (2019). Diversion As Legal Protection Towards Children With Conflict With Law; [Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)]. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 182 – 194. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.847>
- Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651–1667.

Kesimpulan

Kesimpulannya, penyuluhan hak dan kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman anak-anak.